

PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Wahida^{*1}, Maryadi², Syalvia Sjarlis³

^{1,2,3} Program Pascasarjana STIE Nobel Indonesia

e-mail: ^{*1} wahida@gmail.com, ² maryadi@gmail.com, ³ syalviasjalvia@gmail.com

ABSTRAK

Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang diperoleh oleh Kota Parepare mulai dari 2018 hingga 2019 menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Parepare telah memenuhi kualitas laporan keuangan itu sendiri, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan sistem staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi terdiri dari staf yang menangani laporan keuangan di Badan Keuangan Daerah Parepare. Penentuan sampling dengan teknik non probability sampling. Responden untuk penelitian ini terdiri dari 113 orang. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Analisis ini menggunakan regresi analisis berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal controlling tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan secara simultan, kompetensi staf akuntansi dan sistem informasi serta internal controlling memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, variabel sistem informasi memiliki variabel dominan yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: kompetensi staf Akuntansi, Sistem Informasi, Kualitas laporan keuangan, Badan Keuangan Daerah

ABSTRACT

The "Fair without Exception (WTP)" opinion obtained by the Municipality of Parepare from 2018 to 2019 shows that the Regional Financial Board of Parepare has fulfilled the quality of the financial statements themselves, which are relevant, reliable, understandable, and comparable. This study aims to determine the effect of accounting staff competence and systems on the quality of financial statements, both partially and simultaneously. This research is a quantitative research. The population consists of staff who handle financial reports in the Regional Financial Board of Parepare. Determination of sampling with non-probability sampling techniques. Respondents for this study consisted of 112 people. Data collection techniques are questionnaires. This analysis uses multiple regression analysis with the help of SPSS 24 software.

The results showed that internal controlling had no significant effect on the quality of financial statements, while competence and information systems had a significant effect on the quality of financial statements. And simultaneously, the competence of accounting staff and information systems and internal controlling have a significant influence on the quality of financial reporting. In addition, the information system variable has a dominant variable that affects the quality of financial statements.

Keywords: *Accounting staff competencies, Information Systems, Quality of financial reports, Regional Financial Agencies*

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang tersebut berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus tentang pengelolaan keuangan daerah diatur juga di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu hal penting yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah adanya kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban disajikan menurut kriteria atau acuan tertentu. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 bentuk dan isi laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian SAP menjadi kriteria atau acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual (Lampiran I) sebagai pengganti PP 24 Tahun 2005 tentang SAP yang berbasis kas menuju akrual. Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan tindak lanjut dari pasal 36 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2008. Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah seharusnya sudah diterapkan pada tahun 2008, namun dalam strategi penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan basis akrual paling lambat tahun 2015 wajib diimplementasikan secara penuh.

Sebagai regulator keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus sudah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

SAP merupakan acuan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan mengacu pada SAP, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan berkualitas dan dapat dibandingkan, baik antar entitas maupun antar periode pelaporan. Namun demikian, kualitas suatu laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP, tetapi juga dari proses yang dirancang dan dilaksanakan untuk menghasilkan laporan tersebut.

Untuk itu pemerintah daerah harus merancang suatu sistem pengendalian intern (SPI) dalam penyelenggaraan akuntansi dalam bentuk sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - SAPD) yang memadai, yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sekaligus sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan disusun sesuai dengan SAP dan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sehingga dapat dihasilkan informasi yang andal.

Laporan keuangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan tanggung jawab kepala daerah yang bersangkutan. Kepala daerah diwajibkan membuat surat pernyataan yang

menegaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian kepala daerah menjamin bahwa laporan keuangan memuat informasi yang memenuhi kualitas yang disyaratkan. Disinilah diperlukan peran APIP untuk melakukan revidi atas LKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepala daerah kepada BPK sebagaimana dinyatakan dalam dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan kesiapan yang memadai, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun SDM pemda. SDM yang terkait dengan penerapan tersebut terutama SDM yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset, juga SDM yang berhubungan dengan pengawasan, yaitu APIP. Dalam hal revidi LKPD berbasis akrual, diperlukan APIP yang mengerti laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual serta proses penyusunannya, sehingga APIP mampu memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP c.q. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain melaksanakan pembinaan kapabilitas APIP daerah dan pemberian asistensi atas revidi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara lebih lanjut memperjelas bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah.

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa laporan keuangan daerah merupakan rangkaian laporan keuangan beberapa SKPD yang disajikan di laporan keuangan yang

terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan bahwa daerah itu sudah dapat mengikuti prosedur laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2019 sampai dengan November 2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staf pegawai yang mewakili dari 32 SKPD Kota Parepare yang berjumlah 112 orang (Data Desember 2019) yang terdiri dari :

No	Jabatan	Jumlah
1	PPK SKPD	33 Orang
2	Kasubag Keuangan	33 Orang
3	Bendahara Pengeluaran	33 Orang
4	Bendahara Penerimaan	13 Orang
Jumlah		112 orang

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh* (sensus) yakni dengan menentukan semua populasi sebagai sampel total sebanyak 112 orang Staf pegawai yang mewakili dari 32 SKPD Kota Parepare.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji regresi didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.616 + 0.053X_1 + 0.736X_2 + 0.047X_3 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa variabel Internal control tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga harus dikeluarkan dari model, sedangkan variabel kompetensi akuntansi pegawai dan variabel sistem informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Parepare.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.946 ^a	.896	.893	.93997	.896	309.454

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Sig. F Change
	df1	df2	
1	3	108	.000

Selain itu, Pada tabel 3 juga dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,893 atau 89,3% variasi besarnya kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Parepare dapat dijelaskan oleh variasi kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variasi lain diluar model. Dari tabel 3 juga dapat diketahui bahwa hasil uji

anova sebesar 309.454. Dimana F hitung > Ftabel (309.454>2.690) dengan tingkat signifikansi $0.000 < \alpha=0,05$. Nilai F tabel itu sendiri dapat kita ketahui dengan melakukan regresi linear berganda dengan menggunakan variable bebas sebanyak 3 dan jumlah sampel sebanyak 112. Maka DF1 adalah 3 dan DF2 adalah $112-3-1=108$. Jadi DF2 nya adalah 108. Maka didapatkan nilai F tabel pada probabilitas 0,05 dan DF1 3 serta DF2 108 adalah 2,69

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76

Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Parepare.

1. **Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi dan *Internal Control* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare**
 - a. **Pengaruh Kompetensi Akuntansi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare**

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.616	1.367		5.573
	Kompetensi	.053	.025	.085	2.150
	Sistem Infor. Akuntansni	.736	.114	.834	6.441
	Internal Control	.047	.094	.061	.496

Coefficients^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000	.720	1.389
	Kompetensi	.034	.611	1.636
	Sistem Infor. Akuntansni	.000	.058	17.361
	Internal Control	.621	.064	15.654

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 3 dalam penelitian ini diperoleh nilai thitung (2,150) > Ttabel (1,65909) dan nilai signifikansi (0.034) < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi akuntansi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2a) dalam penelitian yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan kompetensi akuntansi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan” pada obyek pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang bertugas sebagai pengelola keuangan, dapat diterima kebenarannya.

b. Pengaruh Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Begitupun pada variabel Sistem berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini diperoleh nilai $T_{hitung} = 6,441 < T_{tabel} 1,65909$ dengan signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah signifikan. Besar pengaruh yang diperoleh adalah sebesar 0,114 dengan arah pengaruh positif yang berarti jika Sistem informasi yang digunakan semakin baik maka Kualitas laporan keuanganan mengalami peningkatan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh signifikan Sistem informasi terhadap Kualitas laporan keuangan”, hal ini dapat dilihat dari observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap para responden dalam pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi yang menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi pegawai penyusun laporan keuangan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dimana laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dihasilkan dari software aplikasi pusat dan sub sistemnya. Sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Namun demikian, hambatan masih sering hadapi oleh para pegawai penyusun laporan keuangan khususnya belum adanya pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang rusak secara terjadwal dan cepat sehingga berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian baik nasional maupun internasional yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya rosalin (2001:5), Aryani (2013:105), Rezae (2013:46), Yosefrinaldi (2013:10), Nuryanto dan Nunuy (2013:168), Sueb (2014:102), yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Senada dengan penelitian di atas Nurillah (2014:45), Hertati (2015:17) dan Sagara (2015:114) juga menemukan Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian dari Diah dan Bestari (2015:147), Lilis dan Wikan (2013:34) yang menemukan bukti empiris bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Internal Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik dalam penelitian ini diperoleh nilai $T_{hitung} = 0,496 < T_{tabel} 1,65909$ dengan signifikansi $0.621 > 0.05$, dapat diketahui bahwa nilai antara variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 0,6210. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Nilai koefisien korelasi 0,6210 termasuk dalam kategori rendah, artinya apabila rata-rata skor sistem pengendalian internal meningkat satu satuan, maka diprediksikan rata-rata skor kualitas laporan keuangan rendah.

2. Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Internal Control berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	820.255	3	273.418	309.454	.000 ^b
	Residual	95.423	108	.884		
	Total	915.679	111			

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keuangan

b. Predictors: (Constant), Internal Control, Kompetensi, Sistem Infor. Akuntasni

Berdasarkan analisis statistik tabel diatas dalam penelitian ini diperoleh nilai Fhitung sebesar 309,454 masih lebih besar dari Ftabel sebesar 2,690 dengan nilai signifikansi Fhitung lebih kecil dari 0,000. Hal ini berarti kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan jadi hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepae.

Penelitian ini konsisten dan menyimpulkan bahwa kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Sistem Informasi merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kantor Bdan Keuangan Daerah Kota Parepare.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.616	1.367		5.573
	Kompetensi	.053	.025	.085	2.150
	Sistem Infor. Akuntasni	.736	.114	.834	6.441
	Internal Control	.047	.094	.061	.496

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.000	.720	1.389
	Kompetensi	.034	.611	1.636
	Sistem Infor. Akuntasni	.000	.058	17.361
	Internal Control	.621	.064	15.654

a. Dependent Variable: Kualitas Lap. Keungan

Berdasarkan analisis statistik pada tabel 1 diperoleh nilai hitung koefisien beta 0.736 > variabel Sistem Informasi Akuntansi (0.000) sehingga dapat disimpulkan bahwa, variabel Sistem Informasi Akuntansi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima yaitu Sistem Informasi Akuntansi merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Dominannya variabel Sistem Informasi Akuntansi dibandingkan kompetensi akuntansi pegawai dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari kebutuhan para penyusun laporan keuangan tingkat pusat dan subsistem laporan keuangan serta para pengolah data keuangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel.

SIMPULAN

Terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti bahwa semakin baik kompetensi akuntansi pegawai dan sistem secara bersama-sama akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tidak terdapat pengaruh signifikan Internal Controlling terhadap kualitas laporan keuangan, artinya meskipun kompetensi akuntansi pegawai baik belum tentu akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Terdapat pengaruh signifikan kompetensi dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik teknologi informasi yang digunakan maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan diantara variabel kompetensi akuntansi pegawai, sistem informasi, dan internal controlling yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah variabel Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berarti bahwa sistem informasi menjadi ukuran yang paling penting dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.

SARAN

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka saran-saran sebagai berikut: penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi dalam mengukur kualitas laporan keuangan, sehingga Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel variabel lain sebagai model dalam penelitian yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam melakukan pengukuran, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat uji SEM dengan sebelumnya memperluas jumlah responden. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada satu instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjawab fenomena yang terjadi pada satu satuan kerja pemerintah daerah saja yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah obyek penelitian semisal meneliti seluruh badan keuangan daerah di sulawesi selatan, sehingga diharapkan akan dapat ditarik kesimpulan yang general terkait pengaruh kompetensi akuntansi pegawai dan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Reviu LKPD Berbasis Akrual (2016). Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP*
- Echdar Saban *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis* (2017). Bogor; Ghalia Indonesia
- Joedono, Satrio Budihardjo. *Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik dan Perwujudan Pengelolaan yang Baik (Good Gonvermance) di Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 1 No.1-4*
- Abdullah M. Soelaiman 1996. *Laporan Keuangan Sektor Publik Dalam Akuntansi Indonesia Menuju Milenium Baru*. Prosiding KNA Ke-3. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Wibowo, 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Rajawali Pers
- Accounting Information System*. (2004). New Jersey Pearson Education, Inc.
- Analysis & Desain Sistem Informasi* (2002) Yogyakarta : ANDI

Arikunto, S. (1995). *Memilih Instrumen Pengumpul Data dalam Manajemen Penelitian*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedjo Budi.(2002) *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*. Yogyakarta:

ANDI

Santoso, Singgih (2014). *SPSS 22 From Essential to Expert Skill* .Jakarta; PT. Elex

Media Komputindo